



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090\*\*  
Email : satpolpp\_prov.ntt@yahoo.com  
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id  
**K U P A N G**

11 Juli 2024

Yth. - Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT  
- Kepala Badan Keuangan Daerah Setda  
Provinsi NTT

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 000.1.5/520/sat pol pp 1.1

JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
2	3	4
Laporan Bulan Juni Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Dikirim untuk ditindak lanjuti

Demikian Laporan ini atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19661029 199403 1 007

Paraf Hirarki :	
Plh. Sekretaris	h
Kepala Subbag Program Data dan Evaluasi	h
Fungsional Ahli Muda	h

LAPORAN BULAN JUNI 2024





## **LAPORAN BULAN JUNI**



### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**Jalan Polisi Militer Nomor 1, Telp/Fax (0380) 828090**

**Email : [satpolpp\\_prov.ntt@yahoo.com](mailto:satpolpp_prov.ntt@yahoo.com)**

**Website : [www.satpol-pp.nttprov.go.id](http://www.satpol-pp.nttprov.go.id)**

**KUPANG**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan kasih-Nya maka Laporan Bulan Juni 2024 - Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi sangat penting yang mana terlaksananya berbagai kegiatan pengamanan dan penegakkan prodak hukum. Keadaan yang nyaman, aman dan tenteram diciptakan guna mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Laporan Bulan Juni Tahun Anggaran Tahun 2024 ini merupakan bahan, data dan informasi yang disusun secara baik, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik ataupun kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kupang, 11 Juli 2024

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. SDM Satuan Polisi Pamong Praja	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	12
A. Rencana Kerja Tahunan	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2024	16
C. Realisasi Anggaran	18
BAB III HASIL PELAKSANAAN	22
A. Sekretariat	22
B. Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	24
C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	26
D. Bidang Perlindungan Masyarakat	30
E. Bidang Sumber Daya Aparatur	28
BAB IV PERMASALAHAN	31
A. Permasalahan	31
B. Tindak Lanjut	31
BAB V PENUTUP	32
- Laporan Keuangan	33
- Lampiran Foto/Dokumentasi	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan masyarakat, dan fungsinya sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi yang telah dijabarkan diatas kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi pamong Praja melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam arti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkaitan dengan hak setiap warga masyarakat yang wajib diperoleh sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya agar mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bulan Juni 2024 laporan kinerja ini menggambarkan kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat dalam proses menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

## **B. Dasar hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud.

Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Juni 2024.

#### 2. Tujuan.

Untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja bulanan yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT bulan Juni Tahun Anggaran 2024.

### D. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 130 orang dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Kepala Satuan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	7
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Jabatan Fungsional	63
7.	Jabatan Fungsional Umum	23
8.	Honorier	29
Jumlah		130



b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	2	3
Kepala Satuan	1	
Sekretaris	-	
Kepala Bidang	3	
Kepala Seksi	5	2
Kepala Sub Bagian	1	2
Jabatan Fungsional	57	6
Pelaksana	17	7
Tenaga Honorer	18	11
Total Jumlah	102	28
	130 Orang	



c. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Rincian Kepangkatan/Golongan					Jumlah
Kepangkatan PNS	A	B	C	D	
Golongan IV	1	2	-	1	4 orang
Golongan III	12	23	11	13	59 orang
Golongan II	-	-	10	28	38 orang
Golongan I	-	-	-	-	- orang
Jumlah	13	25	21	42	101 orang

d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	4
2.	Sarjana (S1)	37	13	50
3.	Diploma (D3)	1	-	-
4.	SMA/SMU	42	5	47
Jumlah		83	18	101

e. Berdasarkan Agama.

No.	Data Keagamaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Islam	4	-	4
2.	Kristen	77	23	100
3.	Katholik	21	5	26
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		102	28	130

Berikut dapat di sampaikan data pemberian cuti dan tindak disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Juni 2024 sesuai ketentuan yang berlaku

1. Cuti tahunan berdasarkan Kepangkatan/Golongan.

No.	Data Cuti Tahunan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	6
3.	Golongan II	1
Jumlah		8

2. Data Pegawai yang kena sanksi Kepegawaian :

No.	Data Pegawai Yang Kena Sanksi Kepegawaian	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	7
3.	Golongan II	2
4.	Banpol	-
5.	Cleaning Service	-
Jumlah		9

Selain melaksanakan tugas Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga melakukan penjagaan (piket) dalam rangka menjaga aset penting milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adapun aset tersebut antara lain :

1. Pos Kantor Gubernur/Sasando.
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur.
3. Rumah Jabatan Wakil Wakil Daerah.
4. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
5. Posko Praja (Kantor Satpol PP).

Penjagaan pada tempat/lokasi jaga dibagi dalam 3 (tiga) sift, dimana masing-masing sift dibagi waktu selama 1 x 24 jam, mulai jam 08:00 pagi hingga jam 08:00 pagi berikutnya. Jadwal pelaksanaan piket diatur sesuai dengan surat keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 (terlampir).

## E Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang diemban didukung dengan prasarana penunjang operasional kegiatan baik di kantor maupun di lapangan. Sarana Prasarana tersebut dicatat sebagai aset karena proses pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

### Sarana Prasarana Pendukung

No	Jenis Nama Barang	Merk/Type/Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW)	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5	Air Condition	Besi /National/ 1Pk	2	Buah	B	2008
6	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009

19	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009
20	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	MejaKerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013
44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013



45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirelesgenggam	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014
66	MejaRapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015

71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017
92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	( Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020

99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes		1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat PPNS		1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi 1		1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi		1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi		1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput		1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Genset	Yamaha/Bensin	2	Unit	B	2021
110	Mobil Truck (DH 8279 WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
111	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

## BAB II

### RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai urusannya dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya mendukung program Kepala Daerah, Hal ini dijabarkan dalam rencana Program Kegiatan sebagai berikut :

#### A. Rencana Kinerja Tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 :

Indikator Kinerja Utama (KU) Tahun 2024  
Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULAINDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76%	100%	Jumlah kegiatan yang diselesaikan -----x 100 Target
		2. Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan -----x100 Jumlah Perda dan Perkada
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran -----x100 Jumlah Wilayah



Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatas dapat diambil langkah strategis antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan sinergitas dengan Instansi/ Unit/ Lembaga Hukum/ Masyarakat/ Stekholder terkait lainnya dalam melakukan pengendalian dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Membangun komunikasi yang secara berkala dalam melakukan diteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk kegiatan yang berdampak pada adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antar Instansi/Unit Kerja/Lembaga Hukum yang tersebar dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.
  2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
  3. Pemenuhan sarana prasarana yang berstandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Rencana Kerja

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Urusan Pemerintah an Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Prov/kab/Kota		12.863.647.600	APBD Prov. NTT			12.863.647.600
05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran yang Berkualitas	Kota Kupang	100 %	12.863.647.600	APBD Prov. NTT		100 %	12.863.647.600
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja PD	Kota Kupang	49 dokumen	38.000.000	APBD Prov. NTT		49 dokumen	38.000.000
1.02	Administrasi keuangan pemerintah daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Kota Kupang	4 laporan	11.032.449.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	11.032.449.000
1.06	Administrasi umum pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Kota Kupang	1 piket	80.000.000	APBD Prov. NTT		1 piket	80.000.000
1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kota Kupang	4 laporan	-			4 laporan	-
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan jasa operasional kantor	Kota Kupang	4 laporan	968.025.600	APBD Prov. NTT		4 laporan	968.025.600
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang menjadi aset	Kota Kupang	4 laporan	113.600.000	APBD Prov. NTT		4 laporan	113.600.000
05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum	Kota Kupang	100 %	624.600.000	APBD Prov. NTT		Kota Kupang	624.600.000
1.01	Penanganan gangguan ketenteraman ddan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya kegiatan penertiban, pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol turjawali dalam rangka trantibum	Kabupaten/kota	12 laporan	524.600.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	524.600.000
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Presentase meningkatnya pencapaian SPM trantibum (jumlah perda dan perkara yang ditegakan)	Kota Kupang	12 laporan	90.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	12 laporan	90.000.000
1.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Kegiatan pengembangan kapasitas PPNS	Kota Kupang	2 laporan	10.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	2 laporan	10.000.000

05.04	Program Pencegahan Penanggulangan Peyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	Kota Kupang	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
1.01	Peyelenggaran pemetaan rawan bencana kebakaran	Peta daerah rawan kebakaran	Kota Kupang	4 laporan	7.000.000	APBD Prov. NTT	Mengkoordinir layanan SPM	4 laporan	7.000.000

Dalam implementasi rencana kerja, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman dan tentram.

## **B. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.**

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruh pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 antara lain :

### **1. Belanja Daerah/Belanja Operasi.**

#### **1. Belanja Daerah/Operasi Rp. 13.121.680.880.- kegiatan ini terdiri dari**

##### **1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**

###### **1.1.1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

###### **1.1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

###### **1.1.2 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.**

###### **1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**

###### **1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah.**

###### **1.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

###### **1.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

###### **1.1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.**

###### **1.1.3.4 Penyediaan Bahan Material.**

###### **1.1.3.5 Fasilitas Kunjungan tamu.**

###### **1.1.3.6 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

###### **1.1.3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**



- 1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 1.1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
  - 1.1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 1.1.5.2 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
  - 1.1.5.3 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

## **1.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- 1.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
  - 1.2.1.1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
  - 1.2.1.2 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
  - 1.2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
  - 1.2.1.4 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - 1.2.1.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - 1.2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan.

1.2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.2.1.8 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

1.2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

1.2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

### **1.3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :**

1.3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

1.3.1.1 Penyusunan dan Pemutahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

1.3.1.2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

## **C. Realisasi Anggaran**

Dalam periode tahun 2024 tersedia pagu anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 yang telah dipertanggungjawabkan

secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>13.121.680.880</b>	<b>5.331.679.697</b>	<b>40.63</b>
<b>01.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>12.266.580.880</b>	<b>5.078.440.516</b>	<b>41.40</b>
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	38.000.000	8.516.000	22.41
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.032.449.000</b>	<b>4.488.375.976</b>	<b>40.68</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	4.488.375.976	40.68
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>39.860.963</b>	<b>49.83</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	750.280	15.01
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	14.562.400	58.25
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.250.000	62.50
	- Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	8.623.807	43.12
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.998.000	99.96
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.176.476	83.53
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	5.500.000	30.56
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>997.031.880</b>	<b>476.859.651</b>	<b>47.83</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	810.000	57.86
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	2.164.800	21.65
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	473.884.851	48.08
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>119.100.000</b>	<b>64.827.926</b>	<b>54.43</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	48.328.426	69.04
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	6.730.000	35.24
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	9.769.500	32.57

<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>848.100.000</b>	<b>253.239.181</b>	<b>29.86</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	<b>748.100.000</b>	<b>231.939.181</b>	<b>31.00</b>
	- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	-	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	-	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	31.370.000	20.91
	- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	-	-
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	-	-
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000	120.105.381	36.06
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	53.399.800	33.12
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	27.064.000	54.13
	<b>Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>90.000.00</b>	<b>16.300.000</b>	<b>18.11</b>
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000	-	-
	- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000	16.300.00	23.29
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	-	-



	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50.00</b>
	- Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	10.000.000	5.000.000	50.00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>7.000.000</b>	-	-
	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>7.000.000</b>	-	-
	- Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	-	-
	- Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	-
	<b>Jumlah Realisasi sampai dengan Mei</b>	<b>13.121.680.880</b>	<b>5.331.679.697</b>	<b>40.63</b>

Kondisi atau keadaan kas per 30 Juni 2024

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian progres fisik dan keuangan pada Bulan Juni 2024 sebesar Rp. 5.331.679.697.- (lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan riby enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 40.63 % dari Total pagu sebesar Rp. 13.121.680.880.- (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

## **BAB III**

### **HASIL PELAKSANAAN**

Dalam Periode sampai dengan bulan Juni 2024 dimana rutin dilaksanakan dengan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Bidang Kesekretariatan.**

##### **1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.**

Capaian pelaksanaan tugas antara lain adalah :

1. Laporan Bulanan Bulan Juni 2024.
2. Laporan e-monev Bulan Juni Tahun 2024.
3. Mengikuti Workshop Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Rencana Aksi (Renaksi) Satu Data Provisni NTT
4. Menghadiri Undangan Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Provisni NTT
5. Menghadiri rapat Tindak lanjut AKIP
6. Mengikuti Pegelaran Budaya Bhayangkara dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024
7. Melaksanakan Pengimputan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 pada SIPD-RI.
8. Meghadiri undangan FGD Pemetaan Masalah Prioritas RDB Provinsi NTT bersama Pemerintah.
9. Melaksanakan Penyampaian dan Pembahasan skema Rancangan APBD Ta. 2025 pada KUA PPAS TA 2025.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### **2. Sub Bagian Keuangan.**

1. Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
2. Menyusun SPJ Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Gaji PNS (LS).
3. Membuat laporan SPJ Fungsional dan laporan Pertanggungjawaban atas belanja SKPD.
4. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

### 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- Kepegawaian

No.	Uraian Program / Kegiatan	Jumlah
1	Membuat rekapan piket bulan Mei Tahun 2024	1 berkas
2	Membuat rekapan kenaikan pangkat	1 berkas
3	Scan bahan administrasi usulan kenaikan pangkat ASN	8 ASN
4	Membuat usulan surat cuti pada aplikasi sip cut	3 ASN
5	Menyelesaikan surat tugas	3 surat
6	Menyelesaikan surat surat Plh	1 surat
7	Memberikan penilaian SKP bulan Mei 2024	8 ASN
8	Melaksanakan kegitan pelatihan kesamaptaan	4 kali
9	Melaksanakan kegitan pengamanan	4 kali
10	Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait	3 kali
11	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	2 kali
12	Mengikuti rapat internal bersama PLt. Kasat	4 kali
13	Menyelesaikan administrasi laporan bulan April di Sub Bid Kepegawaian dan Umum	1 lap
14	Membuat daftar pembagian beras ASN	105 PNS
15	Menyelesaikan tindak lanjut LHP	1 berkas
16	Menyelesaikan rekapan kehadiran piket ASN Tahun 2024	1 dok
17	Memeriksa berkas kenarikan pangkat fungsional	11 ASN
18	Memeriksa berkas BTL pada link YANG TELAH tersedia	11 ASN

- Umum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Jumlah Surat Masuk bulan Juni 2024	47 surat
2.	Jumlah Surat Keluar bulan Juni 2024	50 surat
3.	Jumlah undangan yang masuk bulan Juni 2024	12 surat

- Perlengkapan

Uraian Program/Kegiatan	Jumlah/ Keterangan
Mengatur Cleaning Service untuk membersihkan ruang kantor	Setiap Hari

## **B. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.**

### **Program Kegiatan**

Dalam Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Program kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Kegiatan untuk Bidang Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur yakni Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan lagi melalui Sub kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada, Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub, Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub, Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal), Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub dengan total anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut sebesar **RP. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dan Pelaksanaan Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur dilakukan juga melalui Kegiatan Non Anggaran yakni Penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, yang kemudian pelaksanaan kegiatan tersebut melalui Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Penyerapan anggaran pada DPPA Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 175.000.000,- dan realisasi anggaran pada Bulan Juni sebesar Rp 0,-. (data terlampir).

Selain kegiatan rutin Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai DPA pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024, di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur juga melakukan kegiatan penegakan 3 (tiga) produk hukum yakni 3 (tiga) Peraturan Daerah sesuai target penegakan produk hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yakni :

1. Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### **Hasil Kegiatan**

Hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam rangka mendukung Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat untuk bulan Juni 2024 yakni tersedianya data kegiatan (terlampir) sebagai berikut:

1. Terlaksananya Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tanpa anggaran;
2. Tersedianya Data Kegiatan Penegakan Perda/Perkada;
3. Tersedianya data Pengaduan Masyarakat Bulan Juni Tahun 2024;
4. Tersedianya data Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Bulan Juni Tahun 2024;
5. Tersedianya data Penindakan Atas Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda/Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa.

### **Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi**

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi pada bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Seksie Penyelidikan dan penyidikan dan Seksie Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan) yang telah dilaksanakan adalah :

- ✓ Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait
- ✓ Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perda
- ✓ Mempersiapkan segala administrasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- ✓ Pembuatan TOR dan RKA bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024
- ✓ Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur).

**Penutup.**

Demikian laporan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTT selama bulan Juni dibuat sebagai bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.



**Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  
Bulan Juni 2024.**

**KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dan I (satu) daerah Provinsi	175.000.000.-	21.300.000	12	153.700.000.-	-

**1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	5.000.000.-	-	-	5.000.000.-	-
	Jumlah				5.000.000.-	-

**2. Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub “operasi DBHCHT (rokok ilegal)”**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Bahan Cetak	1,360.000.-	360.000	25	1,020.000.-	-
2	Belanja Makan minum rapat	16.960.000.-	3.040.000	18	13.920.000.-	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang harian transport lokal)	51.680.000.-	2.920.000	25	38.760.000.-	
	Jumlah				53.700.000.-	-

**3. Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	75.000.000.-	-	-	75.000.000.-	-
2	Belanja pakai habis	15.300.000.-	-	-	15.300.000.-	
3	Belanja Jasa Kantor	28.128.000.-	-	-	28.128.000.-	
	Jumlah				15.000.000.-	-

**4. Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	15.000.000.-	-	-	15.000.000.-	-
2	Belanja/alat bahan untuk kantor kegiatan ATK	40.000.-	-	-	40.000.-	
3	Belanja perjalanan dlam kota 22 orang x 4 kali	14.96.000.-	-	-	14.96.000.-	

**5. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa	Ket
			Rp	%		
1	Belanja Operasi	10.000.000.-	-	-	10.000.000.-	-
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	400.000.-	-	-	400.000.-	
3	Belanja makan minum peserta rapat	3.400.000.-	-	-	3.400.000.-	
3	Belanja perjalanan dinas dalam kota (transportasi peserta rapat teknis PPNS)	6.000.000.-	-	-	6.000.000.-	

### C. Ketenteraman dan KetertibanUmum.

#### Bulan Juni 2024

No	Jenis Pengamanan	Jumlah Pengamanan		Masalah	Pemecahan Masalah	Instansi Terkait	Keterangan
		Lokasi Kegiatan	Bulan				
1	2	3	4	6	7	8	9
01.	Melaksanakan pengamanan dan mengikuti upacara memperingati hari Lahirnya Pancasila Tahun 2024 Tingkat Provinsi NTT	Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT	x kegiatan 01 Juni 2024	-	-	TNI, Polri dan Unsur Terkait	50 orang al. Plh Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota Pol PP
02.	Mengikuti rapat bersama PLH Kabid Trantib, Kasi Ops, Kasi HK dan Anggota	Rung Trantib	1 x kegiatan 01 Juni 2024	-	-	-	15 orang al. Kabid, Kasi anggota
03.	Melakukan pengamanan dalam rangka Rapat Paripurna	Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 05 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	15 orang al. Plt Kasat, kabid SDA, Kasi OPS, Kasi HK dan Anggota Pol PP
04.	Melakuka pengamanan aset milik Pemprov NTT (Pemasangan Papan Namam/ P;ang)	Dessa Mata Aer Kab. Kupang	1 x kegiatan 07 Juni 2024	-	-	UPT Pertanian Priv. NTT	55 orang al. Plt Kasat, kabid SDA, Kasi OPS, Kasi HK dan Anggota Pol PP
05.	Melakukan pengamanan aksi ujuk rasa/demonstrasi dari wartawan terkait penilakan UU Pers (Jumlah pendemo : 10 orang	DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 07 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	15 orang al. Plt. Kasat, Kabid, Kasi Ops, HK dan anggota
06.	Mengikuti kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP Prov. NTT tahun 2024	Hotel Silvia Kupang	1 x kegiatan 11 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota Sat Pol PP
07.	Mengikuti kegiatan kesamaptaan	Depan Kantor DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 12 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Pejabat srrektural dan anggota Satpol PP
08.	Melakukan kegiatan karya bakti dharmapertiwi NTT daerah “J” dalam rangka hari lingkungan hidup sedunia di wilayah Korem 161/Wiraksakti Tahun 2024	Pantai Pasir Panjang Kota Kupang	1 x kegiatan 12 Juni 2024	-	-	KOREM 161 Kupang	12 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
09.	Mengikuti kegiatan kesamaptaan	Halaman depan Kantor DPRD Prov NTT	1 x kegiatan 13 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Seluruh pejabat structural dan anggota

10.	Mengikuti kegiatan kesamaptan	Halaman depan Kantor DPRD Prov NTT	1 x kegiatan 14 Juni 2024	-	-	TNI dan Polri	Seluruh pejabat structural dan anggota
11.	Melakukan pengamanan dalam rangka kegiatan sholat idul adha 1445 H Tahun 2024 M	Alun-alun Rumah jabatan Gubernur NTT	1 x kegiatan 16-17 Juni 2024	-	-	-	10 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
12.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 19 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	25 orang al. Kasat, Kabid, Kasi dan anggota
13.	Melakukan pengamanan dan mengikuti apel kesadaran ASN lingkup Pemprov. BTT	Halaman Depan Kantor Gubernur NTT	1 x kegiatan 19 Juni 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP
14.	Melakukan kerja bakti bersama/giat bersih	Halaman Kantor Satpol PP	1 x kegiatan 21 Juni 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
15.	Melakukan pengamanan dalam rangka rapat paripurna	DPRD Prov. NTT	1 x kegiatan 26 Juni 2024	-	-	DPRD Prov. NTT	20 orang al. Plt. Kasat, Kabid SDA, Kasi Ops, HK dan anggota
16.	Olahraga bersama	Halaman depan kantor Satpol PP	1 x kegiatan 28 Juni 2024	-	-	-	Seluruh Pejabat Struktural dan anggota satpol PP
17.	Mengikuti pembinaan rohani secara virtual dari 4 Tokoh Agama	Aula Satpol PP (sevara virtual)	1 x kegiatan 29 Juni 2024	-	-	BKD Prov. NTT	Seluruh ASN Satpol PP Prov. NTT
18.	Melakukan penjagaan dan pengamanan aset milik Pemprov. NTT	Kantor Gubernur sasando, Rujab Gubernur, Rujab Wagub, Rujab Sekda, dan Kantor Satpol PP	1 x kegiatan tanggal 30 x 24 Jam	-	-	5 Pos Piket	Jumlah personil. 62 anggota al. 15 danru, 30 anggota piket, 4 anggota patwal dan 13 anggota pengawas/pengontrol

#### D. Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD (DPPA) Satpol PP Tahun Anggaran 2024 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sub kegiatan khusus bidang SDA dengan alokasi dana untuk belanja Rp. 131.000.000.- Kegiatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan Rp	Realisasi Fisik %	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Kesamaptaan	<b>56.000.000</b>	53.399.800 (95.35 %)	100	2.600.200
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	<b>75.000.000</b>	-	-	-
	<b>Total Pengeluaran s/d Juni 2024</b>	<b>131.000.000</b>	53.399.800	40.76	77.600.200

### E. Bidang Perlindungan Masyarakat.

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutahiran Infromasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran Bimtek Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	Realisasi %	MASALAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>7.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	-	-	-
1.05.02.1.01.04	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kabakaran	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-
	Penyediaan Infirmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
	<b>Total Dana Bulan Mei</b>	<b>7.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	-	-	-

Berikut data personil pemadam kebakaran dan Linmas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

**Data Pemadam Kebakaran Di Provinsi NTT**

<b>No.</b>	<b>Nama kabupaten/Kota</b>	<b>JumlahPersonil</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kota Kupang	2.410	Dalam struktur Organisasi Sat. PolPP Kota Kupang tidak terakomodir Bidang Pemadam Kebakaran karena telah ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang	2.152	
3.	Kabupaten TTS	2.758	
4.	Kabupaten TTU	1.548	
5.	Kabupaten Belu	1.550	
6.	Kabupaten Malaka	1.340	
7.	Kabupaten Alor	894	
8.	Kabupaten Rote Ndao	630	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	276	
10.	Kabupaten Lembata	1.569	
11.	Kabupaten Flores Timur	1.070	
12.	Kabupaten Sikka	1.010	
13.	Kabupaten Ende	1.966	
14.	Kabupaten Ngada	1.018	
15.	Kabupaten Nagekeo	1.386	
16.	Kabupaten Manggarai	1.940	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	1.186	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	1.616	
19.	Kabupaten Sumba Timur	516	
20.	Kabupaten Sumba Tengah	810	
21.	Kabupaten Sumba Barat	1.816	
22.	Kabupaten Sumba Barat Daya	864	
<b>TOTAL</b>		<b>31.325</b>	



### Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi NTT

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah			Jumlah	Ket
		Kec	Kel	Desa		
1.	Kota Kupang	6	51	-	51	
2.	Kabupaten Kupang	24	160	171	2.890	
3.	Kabupaten TTS	32	12	266	6.950	
4.	Kabupaten TTU	24	147	33	1.764	
5.	Kabupaten Belu	12	12	69	1.399	
6.	Kabupaten Malaka	12	127	127	1.337	
7.	Kabupaten Alor	18	175	-	1.283	
8.	Kabupaten Rote Ndao	11	7	113	1.725	
9.	Kabupaten Sabu Raijua	5	5	62	2.083	
10.	Kabupaten Lembata	9	7	125	1.872	
11.	Kabupaten Flores Timur	19	-	251	1.569	
12.	Kabupaten Sikka	21	13	151	2.537	
13.	Kabupaten Ende	21	23	255	1.073	
14.	Kabupaten Nagekeo	7	16	97	684	
15.	Kabupaten Ngada	12	206	206	1.236	
16.	Kabupaten Manggarai	11	26	162	5.678	
17.	Kabupaten Manggarai Timur	9	17	159	4.680	
18.	Kabupaten Manggarai Barat	12	5	169	1.386	
19.	Kabupaten Sumba Barat	12	11	131	2.445	
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	11	74	1.480	
21.	Kabupaten Sumba Tengah	6	6	65	1.300	
22.	Kabupaten Sumba Timur	22	17	180	2.056	
<b>TOTAL</b>		310	1.081	2.866	47.478	

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

#### **A. Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja bulan Juni antara lain :

1. Pelaksanaan capaian kinerja yang terlambat.
2. Ganti Uang (GU) yang terlambat.

#### **B. Tindak Lanjut.**

Melakukan konsultasi dan rapat bersama pimpinan serta melakukan pendekatan dengan Badan Keuangan Daerah terkait pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan.

## **BAB V PENUTUP**

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan bulan Juni 2024, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan pendapat masih sangat dibutuhkan bagi kesempurnaan dari laporan ini.

Demikian laporan bulan Juni Tahun 2024 disajikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kupang, 11 Juli 2024

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**LT. YOHANES OKTOVIANUS, MM**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661029 199403 1 007

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**BULAN JUNI 2024**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	KONDISI s/d BULAN SEBELUMNYA					REALISASI BULAN INI	KONDISI s/d BULAN INI					SSA ANGGARAN (Rp)	KET	
						TARGET		REALISASI				TARGET		REALISASI					
						(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) KEU	(%) FISIK		(%) FISIK	(%) KEU	Rp	(%) FISIK	(%) KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	13.121.680.880				-	-	4.672.768.067	162	162	658.911.630				5.331.679.697	40,63	40,63	7.806.301.183	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.266.580.880					-	4.503.061.759	142	142	575.378.757		-		5.078.440.516	41,40	41,40	7.128.140.364	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.000.000						8.516.000			-	-	-		8.516.000	22,41	22,41	29.484.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	8.516.000	22,41	22,41	-	-	-		8.516.000	22,41	22,41	29.484.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.032.449.000						3.992.957.449			495.418.527		-		4.488.375.976	40,68	40,68	6.544.073.024	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.449.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	3.992.957.449	36,19	36,19	495.418.527		-		4.488.375.976	40,68	40,68	6.544.073.024	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.000.000	DAU		SKPD	-	-	39.385.213	49,23	49,23	475.750		-		39.860.963	49,83	49,83	40.139.037	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	722.780	14,46	14,46	27.500				750.280	15,01	15,01	4.249.720	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	14.114.150	56,46	56,46	448.250				14.562.400	58,25	58,25	20.437.600	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	1.250.000	62,50	62,50	-				1.250.000	62,50	62,50	750.000	
	- Penyediaan Bahan Material	20.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	8.623.807	43,12	43,12	-				8.623.807	43,12	43,12	11.376.193	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.998.000	99,96	99,96	-				4.998.000	99,96	99,96	2.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	4.176.476,00	83,53	83,53	-				4.176.476,00	83,53	83,53	823.524	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	5.500.000	30,56	30,56	-				5.500.000	30,56	30,56	12.500.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	997.031.880	DAU		SKPD	-	-	399.010.171	40,02	40,02	77.849.480		-		476.859.631	47,83	47,83	528.172.248	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	810.000	57,86	57,86	-				810.000	57,86	57,86	590.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	2.164.800	21,65	21,65	-				2.164.800	21,65	21,65	7.835.200	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	396.035.371	40,18	40,18	77.849.480		-		473.884.831	48,08	48,08	511.747.408	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.100.000	DAU		SKPD	-	-	63.192.926	53,06	53,06	1.635.000		-		64.827.526	54,43	54,43	54.272.474	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	47.038.426	67,20	67,20	1.290.000				48.328.426	69,04	69,04	21.671.574	
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000	DAU	Kota Kupang	SKPD	-	-	6.450.000	33,77	33,77	280.000				6.730.000	35,24	35,24	12.370.000	
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	DAU	Kota Kupang		-	-	9.704.500	32,35	32,35	65.000				9.769.500	32,57	32,57	30.230.500	



PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.100.000	DAU	Kab/Kota	-	-	-	169.706.308	20,01	20,01	83.532.873	-	-	259.239.181	29,86	29,86	611.260.829
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	748.100.000	DAU	Kab/Kota	-	-	-	148.406.308	19,84	19,84	83.532.873	-	-	231.939.181	31,00	31,00	516.160.829
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-		-	-	2.500.000
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-		-	-	1.500.000
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	150.000.000	DAU	Kab/Kota				31.370.000	20,91	20,91	-	-	-	31.370.000	20,91	20,91	118.630.000
- Penyedia Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-		-	-	75.000.000
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-		-	-	5.000.000
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	333.100.000	DAU	Kab/Kota				89.972.308	27,01	27,01	30.133.073	-	-	120.105.381	36,06	36,06	212.994.629
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	DAU						-	-	53.399.800	-	-	53.399.800	-	-	131.000.000
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	DAU	Kab/Kota				27.064.000	54,13	54,13	-	-	-	27.064.000	54,13	54,13	22.936.000
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	90.000.000	DAU					16.300.000	18,11	18,11	-	-	-	16.300.000	18,11	18,11	73.700.000
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000													-	-	5.000.000
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000						16.300.000	23,29	23,29	-	-	-	16.300.000	23,29	23,29	53.700.000
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-	-	-		-	-	15.000.000
PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	10.000.000						5.000.000	50,00	50,00	-	-	-	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000						5.000.000	50,00	50,00	-	-	-	5.000.000	50,00	50,00	5.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	7.000.000	DAU					-	-	-	-			-	-	-	7.000.000
PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	7.000.000	DAU					-	-	-	-			-	-	-	7.000.000
Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000	DAU	Kab/Kota					-	-	-				-	-	5.000.000
Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000	DAU	Kota Kupang					-	-	-				-	-	2.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.121.680.880</b>						<b>4.672.768.067</b>	<b>35,61</b>	<b>35,61</b>	<b>658.911.630</b>			<b>5.331.679.697</b>	<b>40,63</b>	<b>40,63</b>	<b>7.790.001.183</b>

Kupang, 03 Juli 2024  
 Dit. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
**Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19661029 193403 1 007



## LAMPIRAN : DOKUMENTASI LAPORAN BULAN JUNI 2024



Foto kegiatan Pengamanan dan Peserta Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila



Foto kegiatan Rapat Bersama Pejabat di Ruang Kasat Satpol PP Provinsi NTT





Foto kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP Provinsi NTT





Foto kegiatan Kesamaptan Satpol PP Provinsi NTT





Foto kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri